

**PENGARUH PDRB, PAD, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TENGAH**

SKRIPSI



OLEH :

Nama : Ahamd Rizki Arif
Nomor Mahasiswa : 12313088
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**

PENGESAHAN

**PENGARUH PDRB, PAD, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA DI
JAWA TENGAH**

Nama : Ahamd Rizki Arif

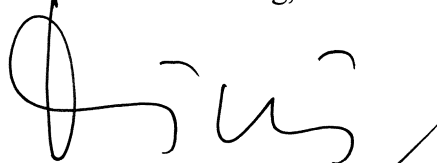
Nomor Mahasiswa : 12313088

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 8 Januari 2016

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Dra. Diana Wijayanti, M.Si.

ABTRAKS

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, khususnya dalam pendapatan kesehatan dan pendidikan. Indeks pembangunan manusia merupakan suatu ukuran capaian kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari tiga komponen, antara lain : kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dalam sistem otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang baik. Salah satu pendukung guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilihat dari seberapa besar kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pengeluarannya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui PAD, DAU, DAU. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh PDRB, PAD, DAU, DAK terhadap indek pembangunan manusia (IPM). Dari hasil pengujian menunjukkan PDRB berpengaruh negatif terhadap IPM, sedangkan PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap IPM namun DAU tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap IPM,

Kata kunci : *Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Indeks Pembangunan Manusia*

ABSTRACT

Human development is a process that aims to achieve well-being, particularly in health and education revenue. Human development index is a measure of the achievements of the welfare of society as seen from the three components, among others: health, education, and standard of living. In the system of regional autonomy is expected to improve the quality of human resources is good. One of the supporters in order to improve the quality of human resources seen from how much to increase the contribution of government spending in order to increase the quality of human resources including through the PAD, DAU, DAU. This study aims to look at how much influence the GDP, PAD, DAU, DAK to the human development index (HDI). From the test

results show the PDRB negatively affect the HDI, while DAK PAD and positive effect on the HDI but DAU no effect and does not significantly terhadap IPM,

Keywords: *Gross Regional Domestic Product, PAD, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and the Human Development Index.*

PENDAHULUAN

Dimasa pergantian era reformasi pembangunan manusia merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia di negara-negara lainpun mempunyai kebijakan tersendiri dalam pembangunan manusia,hal ini karena pembangunan manusia menjadi prioritas peran pemerintah untuk menuju negara yang maju dalam segala aspek terutama pada sumber daya manusia.Desentralisasi fiskal akan menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah terutama dalam bidang ekonomi maupun dari sisi perencanaan, pembangunan serta pembiayaan agar terwujud kemakmuran dan kesejahteraan. Sebab tolak ukur keberhasilan desentralisasi dalam pembangunan dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Menurut *United Nation Development Program (UNDP)* bentuk–bentuk desentralisasi dalam era otonomi daerah meliputi; desentralisasi pelayanan masyarakat, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi politik.

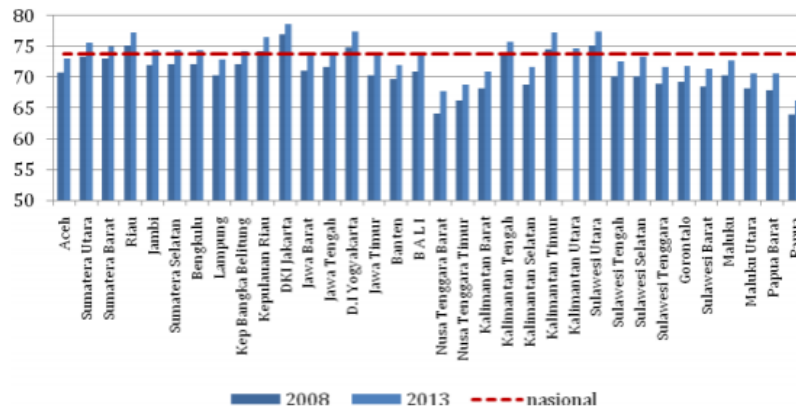
Oleh karena itu daerah yang mampu untuk menggali potensinya akan memperoleh keuntungan bagi daerahnya sendiri terutama dari segi pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. PAD yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UUNo.33/2004). Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemda paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana karena mereka masih menggantungkan adanya dana dari pemerintah pusat, khususnya DAU.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, pemerintah daerah seharusnya bisa mengalokasikan atau memporsikan belanja daerahnya untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik. Menurut Ginting(2008) yang menyatakan bahwa sudah saatnya pembangunan tidak lagi diletakkan pada kekuatan sumber daya alam (*natural resources based*), tetapi pada kekuatan sumber daya manusia (*human resource based*). Caranya adalah dengan meletakkan prioritas pembangunan pada pembangunan manusia, karena pada

akhirnya pembangunan manusia yang berhasil akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia maka setiap daerah akan mampu mengurangi kesenjangan sosial, dengan menyediakan barang dan jasa publik yang lebih baik dan efisien serta dapat mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Berdasarkan Christy dan Aldi (2009) yang menggunakan IPM untuk mengklarifikasi apakah suatu negara adalah negara maju. Negara berkembang atau negara terbelakang dan juga mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Jadi pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Maka IPM sebagai indeks komposit digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi.

Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

IPM Jawa Tengah berada pada peringkat 16 secara nasional dengan nilai IPM sebesar 74,05 pada tahun 2013. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi sedikit perbaikan dari 71,1 tahun pada tahun 2008 menjadi 71,97 tahun pada tahun 2013. Rata - rata lama sekolah di Jawa Tengah meningkat dari 6,86 tahun pada 2008 menjadi 7,43 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Jawa Tengah pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 89,24 menjadi 91,71 persen, lebih rendah dari capaian nasional 94,14 persen.

Tabel Tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)atas dasar harga konstan 2000 di 5 (Lima) Kabupaten/kota Tertinggi di Jawa Tengah(Milyar Rupiah)di 5 (Lima) tahun terakhir

Periode 2009-2013

No	Kabupaten/kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Cilacap	34628646.61	39460153.36	44904175.78	49908374.59	56097880.04
2	Kota Semarang	38176233.88	43398190.77	48461410.41	54384654.53	61092825.55
3	Kab. Kudus	28905457.01	31463806.8	33830035.59	36959414.04	41192663.77
4	Kab. Brebes	12532516.7	14629929.68	16426881.4	18026804.5	20199855.92
5	Kab. Semarang	10069045.33	11071609.32	12335446.51	13845496.17	15748752.42

Sumber :*Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa PDRB kabupaten/kota provinsi jawa tengah mengalami pertumbuhan yang sangat baik, kenaikan PDRB terjadi disetiap tahunnya. Kenaikan tersebut juga dialami kota semarang pada tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan peningkatan sebesar Rp. 61092825.55 millyar artinya bahwa kenaikan PDRB pada kota tersebut mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Pada tahun 2013 terjadi perbedaan signifikan antara kabupaten Kudus dengan Brebes dimana selisih kenaikan PDRB sebesar Rp. 20992807.8 milyar artinya bahwa kedua kabupaten tersebut memiliki perbedaan dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Sedangkan kabupaten Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan baik, berarti meningkatnya pertumbuhan kabupaten semarang diimbangi dengan tingkat pembangunan infrastruktur kota dan desa serta aksesibilitas transportasi.

TabelTingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 (Lima) Kabupaten/kota Tertinggi di Jawa Tengah (Milyar Rupiah) di 5 (Lima) tahun terakhir Periode 2009-2013

No	Kabupaten	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kota Semarang	306112423	327992259	521538058	780969273	925919311
2	Kab. Banyumas	120520362	164892425	191899681	242106509	308349434
3	Kota Surakarta	101972319	211149622	181096817	231672101	298400847
4	Kab. Cilacap	120746426	149709124	172327031	196673443	278890649
5	Kab. Semarang	90389871	98831141	133198913	156104005	215679554

Sumber :*Badan Pusat Statistik*

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat dari lima kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan asli daerah tertinggi dilima tahun terakhir yaitu kota semarang sebesar Rp. 925919311 yang ditahun sebelumnya ditahun 2010 memperoleh pendapatan daerahnya sebesar Rp.306112423 secara bertahap namun pasti kota semarang bisa mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya secara signifikan , diikuti dengan pendapatan asli daerah kabupaten Banyumas yang meningkat sebesar Rp. 308349434 dengan selisih pendapatan asli daerah pada tahun 2009 sebesar Rp. 65942925, begitu juga dengan kabupaten/kota Surakarta, cilacap dan semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa 5 (lima) kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan asli daerah dan dari seluruh 34 kabupaten/kota di jawa tengah setiap daerah mampu untuk mengoptimalkan pendapatannya asli daerahnya melalui potensi sumber daya yang ada di setiap daerahnya, dengan begitu pemerintah daerah akan mudah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publiknya dan berdampak pada pembangunan manusia.

TabelTingkat Dana Alokasi Umum (DAU) 6 (Enam) Kabupaten/kota Tertinggi di Jawa Tengah (Milyar Rupiah) di 5 (Lima) tahun terakhir Periode 2009-2013

No	Kabupaten/kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Cilacap	782143772	793266735	876994368	1057808013	1197315060
2	Kab. Banyumas	735150422	720191172	835609874	991945010	242106509
3	Kab. Brebes	716589942	738270368	78275850	981051188	1098999510
4	Kab. Klaten	726192262	726234465	793292770	967284829	1066318427
5	Kota Semarang	707635157	327992259	715700805	936865926	1054002569

Sumber :*Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas DAU yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, kabupaten Cilacap merupakan daerah yang memperoleh DAU tertinggi di lima tahun terakhir sebesar Rp. 1197315060 sedangkan kabupaten Banyumas memperoleh dana transfer Rp. 242106509 diikuti dengan meningkatnya dana alokasi umum ke kabupaten/kota yaitu Brebes, Klaten dan kota semarang, hal ini menandakan bahwa pemberian dana alokasi umum dari pemerintah pusat ke daerah adalah bentuk untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bertujuan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Disisi lain

pemberian DAU yang besar mencerminkan bahwa desentralisasi masih kurang dalam pelaksanaannya.

Tabel Tingkat Dana Alokasi Khusus (DAK) 4 (Empat) Kabupaten/kota Tertinggi di Jawa Tengah (Milyar Rupiah) di 5 (Lima) tahun terakhir Periode 2009-2013

No	Kabupaten/kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Cilacap	86475000	100844400	102075700	87652460	108157350
2	Kab. Banyumas	37629000	76326300	93892400	118901780	1127939938
3	Kab. Tegal	46276000	62484100	61332900	74555350	925576304
4	Kab. Karanganyar	68096000	55095100	577562945	55514410	810216582
5	Kab. Kendal	74895000	58544700	93289527	63884980	788134078

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan tabel 4.5 diatas yang merupakan DAK yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan khusus untuk meningkatkan kualitas masyarakat daerah, dari kelima kabupaten diatas kabupaten cilacap adalah kabupaten yang memperoleh transfer DAK dari pemerintah pusat sebesar Rp. 108157350 meningkat dari tahun sebelumnya.

Dari beberapa tabel diatas yang menggambarkan bahwa ada dari beberapa kabupaten/kota di jawa tengah yang tingkat kemandirian keuangannya masih harus mendapatkan dana transfer yang besar dari pemerintah pusat, maka menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul :“ PENGARUH PDRB, PAD, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TENGAH ”

Rumusan Masalah Penelitian

Bedasarkan latar belakang diatas , untuk memudahkan dan membuat pembahasan menjadi sistematis maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2013 ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2013 ?

3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2013 ?
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusiapada Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2013 ?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sunarno dan Eka R (2006) indeks pembangunan manusia (IPM) untuk mengukur tingkat pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, komponen yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Menurut Mooris, keterkaitan pembangunan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) mampu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui tiga indikator : tingkat harapan hidup, angka kematian, tingkat melek huruf, dan tingkat pendapatan riil perkapita berdasarkan daya beli masing – masing negara.

Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Tavip A. Rayanto (2002) jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ada jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu daerah pada saat periode tertentu. Secara kuantitatif merupakan nilai barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga berlaku (*at current price*) dan atas dasar harga konstan (*at constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengukur besaran pembangunan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi, sementara PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi riil atau perubahan volume produksi. PDRB perkapita adalah PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Terdapat dua ukuran PDRB perkapita, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (riil) .

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan “. Menurut Warsito (2001) dalam damang (2011) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005) dalam damang (2001) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain –lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *blockgrant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Kafilah Dzirkullah).

Dana Alokasi Khusus

(Kafilah Dzirkullah), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhannya, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu,

Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun

Dalam hal lain dana alokasi khusus juga dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Dana alokasi khusus dapat juga disebut dana infrastruktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas. Menurut Adisasmita (2014), yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah :

- a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, misalnya :
 - Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.
 - Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
 - Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
 - Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah pesisir/kepulauan.
 - Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
- b) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional yang meliputi:
 - Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi komitmen pemerintah dengan lembaga donor.
 - Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Tahunan

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan berbagai landasan teori yang di kemukakan, adalah merupakan salah satu kesimpulan dan argumentasi yang sifatnya sementara benar, sehingga dalam hal ini membutuhkan data-data hasil penelitian agar dapat dicari kebenarannya dan

ditarik konsekuensi logis. Dalam penjelasan dapat dibuat beberapa hipotesis yang menjadi landasan dalam penelitian :

- 1) Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 2) Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 3) Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 4) Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel Independen (Y)

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan bahwa daerah tersebut tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup baik. Data ini diambil di 35 (Tiga puluh lima) kabupaten /kota provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2006–2013 setiap kabupaten/kota mengalami peningkatan, namun masih terdapat daerah yang mengalami tingkat IPM yang terendah dibanding wilayah lain.

Variabel Dependen (X)

Dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel dependen di antara yaitu :

1. PDRB (X1)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah daerah di Indonesia dalam periode tahun 2009-2013 diukur secara satuan miliar rupiah.

2. Pendapatan Asli Daerah PAD (X2)

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah yang dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah (BUMD), dan lain-lain PAD yang sah

3. Dana Alokasi Umum DAU (X3)

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan menggantikan subsidi daerah otonom dan dana inpres..

4. Dana Alokasi Khusus DAK (X4)

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui program - program pelayanan publik periode 2006 -2013

Sumber data yang digunakan penelitian ini bersumber dari situs badan pusat statistik. Selain itu, fasilitas internet juga banyak digunakan dalam penelitian ini dalam mencari data. Yang mana sumber dalam pencarian data melalui situs Badan Pusat Statistik, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Departemen Keuangan, *United Nation Development Programe* (UNDP). Serta hasil dari penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, serta bahan literatur lainnya, sehingga pengumpulan data lebih mudah dalam pencarian data yang diperlukan peneliti.

kabupaten/kota, karena kabupaten/kota secara keseluruhan bertanggung jawab atas laporan anggaran setiap pemerintah dalam menjalankan program pemerintah terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

Metode Analisis Data

Data Panel

Data panel adalah data regresi penggabungan data time series dan cross section. Data time series merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal atau tahunan. Sedangkan data cross section merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perorangan. Penggabungan kedua jenis data dapat dilihat bahwa variabel terikat terdiri dari beberapa daerah (cross section) namun dalam berbagai periode waktu (time series), runtut waktu yang membahas sekumpulan observasi dalam rentang waktu yang ditentukan, (Widarjono, 2009, hal. 229).

Model Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh yang merupakan gabungan dua time series dan cross section sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak dan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Selanjutnya penggabungan itu informasi data dari time series dan cross section. Dengan menggunakan bantuan program *Eviews 9.1*. Data dalam penelitian ini menggunakan jenis data panel, sedangkan variabel independen yaitu PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Variabel dependen yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, adalah :

$$IPM = f \{PDRB, PAD, DAU, DAK\}$$

$$Y : \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

Keterangan :

Y = Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah
periode 2006 – 2013

X1 = PDRB (2006 – 2013)

X2 = Pendapatan Asli Daerah(2006 – 2013)

X3 = Dana Alokasi Umum(2006 – 2013)

X4 = Dana Alokasi Khusus (2006 – 2013)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

μ = Kesalahan Pengganggu

Selanjutnya persamaan regresi tersebut akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan data dengan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh beberapa variabel independen (X1, X2, X3, X4) yang digunakan dalam penelitian ini.

Estimasi Regresi Data Panel

1. Common Effect

Tujuan dari metode ini Model Regresi *Common Effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, hanya dengan menggabungkan data cross section dan time series tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka model dapat diestimasi

dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* (Widarjono,2009,231). Hasil regresi menunjukkan ketika terjadi kenaikan koefisien secara statistic uji t pada $\alpha = 1\%$ maka keseluruhan menyangkut uji F . Jika harga saham naik 1% maka nilai Y akan naik dan faktor lain diasumsikan tetap.

2. Fixed Effect

Model ini mangamsusikan bahwa perbedaaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik varianbel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan intensif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Hasil regresi metode *fixed effect* berhubungan terhadap variabel X_1 dan variabel X_2 bertanda positif sesuai hipotesis dan secara statistic signifikan melalui uji t pada $\alpha = 1\%$ semua variabel bertanda negative dan secar statistic juga signifikan. Signifikan terhadap variabel dummy menunjukkan bahwa intersep antara variabel $X_1, X_2, X_3, X\dots$ dapat berbeda. Dengan demikian model *fixed effect* mampu menjelaskan adanya perbedaan perilaku diatas.

3. Random Effect

Model ini akan mengstimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.pada model *Random Effect* perbedaan intesepe di akomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan model *Random Effect* yakni menghilangkan heterokedasitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component (ECM)* atau teknik *Generlized Least Square (GLS)*. Jika nilai koofesien untuk variabel $X_1 = 0,6084$ dab $X_2 = 0,3419$ Ssecara statistic signifikan pada $\alpha = 1\%$ artinya X_2 berpengaruh positif terhadap Y . Kalau nilai koofesien tersebut juga tidak jauh berbeda dengan metode *Fixed Effect*. Jika intersep (c) - 1,185 merupakan nilai rata-ratadari komponen kesalahan random (*random error component*) dan nialai *randomeffect* menunjukkan besar perbedaan komponenkesalahan random *coefficient* terhadap nilai intersepsemua *coefecient* rata-rata.

HASIL DAN ANALISIS

Setelah dilakukan pengumpulan data yang berupa laporan realisasi APDB Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2006 sampai dengan 2013 yang

diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui produk domestik regional bruto, pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia

Pada bab ini akan diuraikan data-data yang digunakan dalam bentuk deskripsi data. Kemudian dari data yang ada, diperoleh hasil analisis dengan menggunakan beberapa alat analisis, antara lain : analisis regresi data panel, uji statistik.

Pemilihan Model Regresi

Dalam penelitian ini dilakukan uji signifikansi dengan pendekatan *Fixed Effect* dan *Random Effect* yang bertujuan untuk memilih hasil rekresi antara *common effect*, *fixed effect* atau *random effect*.

Likelihood Ratio Test (Chow Test)

Likelihood ratio test dilakukan untuk mengetahui apakah model yang lebih baik untuk digunakan adalah pendekatan *Panel Least Squares (common effect)* atau pendekatan efek tetap (*fixed effect*). Uji ini dilakukan dengan prosedur uji F-statistic dengan hipotesis :

$H_0 = \text{Panel Least Squares (common)}$ lebih baik daripada *Fixed Effect Model*.

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$ lebih baik daripada *Pooled Least Square (common)*.

Hasil *Likelihood ratio test* adalah sebagai berikut :

Hasil Pengujian *Likelihood Ratio Test*

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.129655	(34,237)	0.0000
Cross-section Chi-square	342.384156	34	0.0000

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews v.09, 2015.

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh angka probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 dengan demikian maka diketahui bahwa nilai p-value lebih kecil dari α (0,05), sehingga kesimpulan dari hasil uji *Chow* adalah menolak H_0 , sehingga model *Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan. Selanjutnya akan di uji melalui uji hausman

Uji Hausman

Hausman test digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan hipotesis:

$H_0 = \text{Random Effect Model}$ lebih baik daripada *Fixed Effect Model*.

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$ lebih baik daripada *Random Effect Model*.

Hasil pengujian *Hausman Test* adalah sebagai berikut :

Hasil Pengujian Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.146837	4	0.0007

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.6, 2015.

Dari tabel di atas dijelaskan nilai probabilitas *cross section random* $> \alpha$ 5% sehingga menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif yakni model *fixed* merupakan model yang terbaik.

Dari uji signifikan (Uji Chow dan Hausman) didapatkan model yang terbaik yakni model *fixed effect*, sehingga model dengan jenis pendekatan *fixed* layak sebagai pengujian model sebagai berikut :

Estimasi Output Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: IPM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/01/16 Time: 10:46				
Sample: 2006 2013				
Periods included: 8				
Cross-sections included: 35				
Total panel (unbalanced) observations: 276				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	33.59490	3.937890	8.531191	0.0000
LOG(PDRB)	-0.639749	0.300292	-2.130423	0.0341
LOG(PAD)	1.898228	0.264675	7.171927	0.0000
LOG(DAU)	0.346943	0.225743	1.536893	0.1256
LOG(DAK)	0.408459	0.100708	4.055871	0.0001
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.821399	Mean dependent var		72.17380
Adjusted R-squared	0.763236	S.D. dependent var		2.463096

S.E. of regression	1.198503	Akaike info criterion	3.330291
Sum squared resid	340.4289	Schwarz criterion	3.841870
Log likelihood	-420.5802	Hannan-Quinn criter.	3.535579
F-statistic	24.32881	Durbin-Watson stat	1.761096
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.09, 2015.

Dari hasil regresi panel data dengan fixed effect, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_i$$

$$(IPM_{it}) = 33.59490 - 0.639749 \log(PDRB_{it}) + 1.898228 \log(PAD_{it}) + 0.346943 \log(DAU_{it}) + 0.408459 \log(DAK_{it})$$

$$R^2 = 0.821399 \quad N = 276 \quad F\text{-stat} = 24.32881$$

Analisis Hasil Regresi

Fixed Effect Model

Berdasarkan tabel variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan ditandai dengan nilai t tabel < t hitung sebesar (1.964663 < -2.130423), bahwa kenaikan PDRB Rp 1 juta rupiah akan menurunkan IPM sebesar -0.639749%. variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan t-tabel > t hitung sebesar (1,964663 > 7.986582), bahwa kenaikan PAD Rp 1 Milyar akan menaikkan IPM sebesar 1.898228, variabel DAU tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan nilai t-tabel sebesar (1,964663 < 1.536893), variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t-tabel > t-hitung sebesar (1,964663 > 4.055871).

Dari regresi menunjukkan R² sebesar 0.82 yang berarti variabel dalam model dapat menjelaskan IPM sebesar 82.13, dan sisanya 17,87% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Uji F (Uji Serempak)

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Fixed Effect* menunjukkan nilai F-statistik sebesar 24.32881 dan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000. Dengan membandingkan nilai F-statistik tersebut dengan nilai F-tabel sebesar 4,31 ($\alpha=1\%$) maka diketahui bahwa F-statistik > F-tabel sehingga disimpulkan bahwa semua *regressor* (variabel independen) secara bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) merupakan suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur

seberapa dekat garis regresi yang telah diestimasi dengan data sesungguhnya. Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Fixed Effect Model* menghasilkan nilai R^2 sebesar 0.821399 yang berarti bahwa sebanyak 82.13 persen variasi atau perubahan pada indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di provinsi jawa tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen dalam model, sedangkan sisanya (20.01 persen) dijelaskan oleh sebab lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Statistika t

Hasil pengujian regresi dalam penelitian ini menunjukkan tiga variabel bebas dinilai signifikan dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05 yaitu, logPDRB (0,0001) yang merupakan variabel PDRB , dan logPAD (0.0000) yang merupakan variabel pendapatan asli daerah dan logDAK (0.0001) yang merupakan dana alokasi khusus sedangkan logDAK (0.1256) yang merupakan variabel dana alokasi umum Variabel bebas dinilai tidak berpengaruh signifikan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas diatas 0,05, Secara umum persamaan model penelitian dapat ditulis sebagai berikut :

$$\ln IPM = 33.59490 - 0.639749 \ln PDRB + 1.898228 \ln PAD + 0.346943 \ln DAU + 0.408459 \ln DAK$$

Berdasarkan persamaan diatas diketahui bahwa nilai konstanta (intersep) sebesar, menunjukkan tingkat IPM secara umum adalah 33.59490 apabila nilai semua variabel independen adalah 0. Koefisien regresi PDRB adalah -0.639749 mengindikasikan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara PDRB dengan IPM, artinya apabila terjadi peningkatan PDRB di kabupaten/kota provinsi jawa tengah sebesar Rp 1 juta rupiah maka tingkat IPM akan menurun sebesar -0.639749 persen. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah adalah 1.898228 mengindikasikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan variabel dependen (IPM). Koefisien regresi dari variabel dana alokasi umum adalah 0.346943 juga mengindikasikan bahwa ada pengaruh positif dan tidak signifikan antara DAU dengan variabel dependen (IPM), koefisien variabel DAK adalah 0.408459 mengindikasikan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara variabel DAK dengan variabel dependen (IPM) artinya apabila terjadi peningkatan DAK di kabupaten/kota provinsi jawa tengah sebesar Rp 1 juta maka tingkat IPM akan meningkat sebesar 0.408459 persen.

Hasil pengujian Hipotesis

Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa dari keempat variabel yang dimasukkan dalam model, satu variabel berpengaruh positif dan satu variabel berpengaruh namun negatif, dan dua variabel yang tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dengan pembahasan sebagai berikut :

Produk domestic regional bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM kabupaten /kota di jawa tengah

Dari hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Pembahasan yang menggunakan variabel PDRB diperoleh hasil nilai t hitung sebesar -2.130423 dengan probabilitas $0.000 < 0,10$, yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara PDRB dengan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di provinsi jawa tengah,

Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten /kota di jawa tengah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh nilai t hitung sebesar 7.71927 dengan probabilitas $0.0000 > 0,50$ persen, yang berarti terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota jawa tengah. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. dengan begitu hasil ini didukung oleh penelitian, Septiana (2008), dan Andiwiyana (2011), Istiqomah (2012), dan Sasongko (2012) bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, sehingga jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki pemerintah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Sehingga pemerintah akan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk pembangunan manusia.

Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap IPM kabupaten /kota di jawa tengah

Hipotesis ketiga yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh nilai t hitung sebesar 1.536893 dan tingkat signifikan sebesar $0,1256 < \alpha 5$ persen, yang berarti tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi jawa tengah. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini bertolak dengan penelitian yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini Harahap (2010), DAU yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini berarti terjadi transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini guna untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten /kota di jawa tengah

Hipotesis keempat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh nilai t hitung sebesar 4.055871 dan tingkat signifikan sebesar $0,0001 < 0,05$, yang berarti ada pengaruh signifikan antara tingkat dana alokasi khusus Terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di provinsi jawa tengah. Adanya kenaikan IPM yang cukup signifikan dari peningkatan variabel DAK dapat dimaklumi karena DAK merupakan *special grants* yang penggunaannya sudah ditentukan sebagai dana infrastruktur, yaitu belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian terhadap hipotesis yang disusun sebagaimana telah di bahas di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis diperoleh Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota di jawa tengah. Dengan

begitu jika Produk Domestik Regional Bruto meningkat maka akan meningkatkan terhadap peningkatan nilai IPM Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini terjadi dikarenakan Jawa Tengah sebagai provinsi ketahanan pangan.

2. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Artinya semakin besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh tiap daerah di Kabupaten/kota maka akan berpengaruh terhadap IPM. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan asli daerah pada tiap Kabupaten/kota di Jawa Tengah dialokasikan guna pembangunan daerah, walaupun pendapatan asli daerah hanya 20% kontribusinya terhadap pembangunan, namun jika setiap tahunnya mengalami peningkatan, pemerintah akan mampu untuk lebih meningkatkan potensi daerahnya terutama pada sumber daya manusia

3. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini diduga disebabkan karena proporsi dana alokasi umum yang dialokasikan untuk pembangunan kurang besar. Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif seperti melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program kepentingan publik. Adanya program-program untuk kepentingan publik diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

4. Dari hasil analisis diperoleh dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah memberikan alokasi dana yang memang khusus untuk memperbaiki fasilitas umum karena pemerintah daerah sangat merespon tanggapan masyarakat mengenai perbaikan fasilitas publik. Hal ini juga disebabkan oleh baiknya koordinasi pemerintah daerah atas dan yang diperoleh dari provinsi. Sehingga pembangunan khusus yang diarahkan untuk publik

\

DAFTAR PUSTAKA

- Christy, Andrea, F., Adi, P.H. 2009. “*Hubungan Antara Dana Alokasi Umu, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia*”. The 3Rd National Conference UKWMS Surabaya, oktober 10th 2009.
- Setyowati, Lilis. 2012. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah)*”. Jurnal Prestasi Vol. 9 No. 1. Jurnal 2012.
- Hakim, Abdul 2002. *Ekonomi Pembangunan EKONISIA*, Yogyakarta.
- Dewi, S.P., Suyanto 2014, “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2007-2011)*”. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Lugastoro, D.P. 2013. “*analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur*”. Ilmu Ekonomi Fakultas Dan Bisnis Brawijaya Malang.
- Sunarno, Eka, R. 2006. *Indeks Pembangunan Manusia 2004-2005*, cv. Nario Sari, Jakarta.
- Halim, A., Mujib, I. 2009. “*Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*”. Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Arsyad Licollin 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke4, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Rayanto, T.A 2002. *Analisis Produk Domestic Bruto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2007-2011*. BAPPEDA Provinsi D.I Yogyakarta.
- Kuncoro, Haryo. 2007. “*Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akutansi X.
- Mahmudi 2013. *Akutansi Sektor Publik Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan* UII Press.
- Widarjono, Agus 2013. “*Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya : Disertai Panduan Eviews*”, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Utomo, G.B. 2015. “*Faktor- faktor penentu indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Yogyakarta tahun 2004-2013*” Skripsi. Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- HariadiPranomo. 2010. “*Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah*”, Vol 9, No,2, Desember 2010, hal 72-77, Fakultas Ekonomi, Universitas Jendral Soedirman Jawa Tengah.
- Setiyawati, Hamzah. 2007, “*Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur*”, Jurnal Akutansi dan Keuangan Indonesia, Vol.4, No,2 hal.211-228, Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo.
- Bappenas, BPS, UNDP. 2001 “*Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2001, Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan pembangunan Manusia Di Indonesia*, Bappenas, BPS, UNDP. Jakarta

UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Sumber Internet :

Kajian fiskal regional Jawa Tengah semester II tahun 2013,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah”

ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/pengumuman/2014/KFR/KFR_Semester_II_2013/13.%20KFR%20Jawa%20Tengah%20Semester%20II%20TA%202013%20-%20Tanpa%20Lampiran.pdf